



Dampak Teknologi Digital dan Media Sosial terhadap Demokrasi

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Irwan Madamang Universitas Sulawesi Tenggara irwanmadamang@gmail.com +6285394302974</p> <p>Ahmad Muhardin Hadmar Universitas Sulawesi Tenggara ahmadmuhardin@gmail.com +6282346499636</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Madamang, I., Hadmar, A. M., (2025). Dampak Teknologi Digital dan Media Sosial terhadap Demokrasi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3069-3074 .

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak teknologi digital dan media sosial terhadap demokrasi, dengan menggunakan teknik literatur review, hasil penelitian bahwa Kemajuan teknologi digital telah memperkuat partisipasi politik di Indonesia, memungkinkan warga negara untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik melalui internet dan media sosial. Namun, tantangan muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas dan memastikan literasi digital yang baik di antara masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan memastikan partisipasi politik yang sehat dan berdampak positif di era digital ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya memainkan peran kunci dalam memperkuat partisipasi masyarakat melalui teknologi dan media sosial dalam proses demokrasi di Indonesia. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung, mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi, serta meningkatkan literasi media dan kesadaran publik. Kolaborasi ini juga memungkinkan advokasi bersama dalam mengatasi konten negatif dan mempromosikan partisipasi yang sehat. Melalui upaya bersama ini, diharapkan manfaat teknologi dan media sosial dalam demokrasi dapat dioptimalkan sambil mengatasi dampak

Kata Kunci: Hasil Demokrasi, Media Sosial, Teknologi Digital

Abstract

The purpose of this study was to determine the impact of digital technology and social media on democracy, using the literature review technique, the results of the study that advances in digital technology have strengthened political participation in Indonesia, allowing citizens to engage more actively in political process through the internet and social media. However, challenges arise in managing widespread information and ensuring good digital literacy among the public. Collaboration between the government, non-governmental organizations and other stakeholders plays a key role in strengthening public participation through technology and social media in Indonesia's democratic process. By working together, they can develop supportive policies, regulate and oversee the use of technology, and improve media literacy and public awareness. This collaboration also enables joint advocacy in addressing negative content and promoting healthy participation. Through these joint efforts, it is hoped that the benefits of technology and social media in democracy can be optimized while addressing the impacts of negative content.

Key Words: Democracy, Social Media, Digital Technology

A. Pendahuluan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menunjukkan kekuasaan dan otoritas yang ada pada masyarakat. Pada saat ini teknologi informasi, demokrasi di era digital sangat berkembang karena adanya kerja sama masyarakat. Munculnya teknologi dan media sosial banyak memberi masyarakat dampak yang penting terhadap cara masyarakat bekerjasama dalam prosedur demokrasi.[1]

Kehadiran internet terbukti memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap runtuhnya rezim otoriter dan sekaligus menciptakan harapan baru percepatan demokratisasi [2]. Dalam konteks ini, internet berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, memperluas cakrawala warga dalam memahami realitas politik mereka. Gerakan-gerakan pro-demokrasi dapat menggunakan platform-platform online untuk mengorganisir protes, menggalang dukungan, dan menyebarkan pesan-pesan yang mendukung perubahan politik positif. Misalnya, demonstrasi massal dan kampanye daring telah membuktikan keefektifannya dalam menantang kekuasaan otoriter, seperti yang terjadi selama Revolusi Arab atau dalam berbagai gerakan pro-demokrasi di berbagai negara.

Tidak hanya itu, internet juga berperan dalam memperkuat jaringan antara aktivis dan kelompok-kelompok progresif di seluruh dunia, memfasilitasi pertukaran ide dan strategi yang mendorong perubahan politik. Melalui jejaring sosial dan platform berita independen, narasi-narasi alternatif yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dapat menembus sensor dan kontrol rezim otoriter, memberikan suara kepada yang sebelumnya terpinggirkan.

Selain itu, internet juga memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses politik, baik melalui partisipasi dalam pemilihan umum maupun melalui mekanisme partisipasi publik online yang memungkinkan rakyat untuk memberikan masukan langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian, internet tidak hanya merupakan alat untuk memerangi rezim otoriter, tetapi juga merupakan katalisator bagi perubahan sosial dan politik yang lebih luas, menciptakan harapan baru untuk percepatan demokratisasi di seluruh dunia.

Di Indonesia internet juga cukup berperan dalam mengakhiri pemerintahan otoritarian di era orde baru, kemudian menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran negara yang mengalami transisi demokrasi berkat internet yang kemudian memberikan sumbangan terhadap upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan. Seiring dengan perkembangan penggunaan internet menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi membawa demokrasi mengalami pergeseran.[3]

Kemajuan teknologi digital banyak membawa perubahan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses demokrasi. Era digital sudah menghasilkan ruang baru bagi warga negara untuk ikut melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengeluarkan aspirasi mereka. Namun ada beberapa hal lain, kemajuan ini juga dapat membuat tantangan baru yang dapat mengubah derajat demokrasi itu sendiri. Adanya teknologi digital ini juga dapat mengubah antarhubungan masyarakat dengan pemerintah dan mengubah dinamika

politik yang ada. Berkembangnya teknologi digital dapat membuka ruang baru yang memperbolehkan partisipasi politik secara lebih inklusif dan menjadikan masyarakat untuk ikut serta dalam prosedur pembuatan keputusan politik yang memudahkan dan mempercepat. Penggunaan internet menjadi krisis dalam kemajuan teknologi, dan angka pemakaian internet di beberapa wilayah Indonesia sedang mengalami kemajuan yang relevan.[3]

Dalam era digital saat ini juga memicu perlawanan yang serius bagi demokrasi. Dengan munculnya sarana prasarana yang lebih luas bagi informasi politik dan partisipasi politik melewati serangkaian teknologi, perlawanan seperti menyebarkan informasi palsu yang dapat mengubah respon dan keputusan politik masyarakat yang membuat lebih mengkhawatirkan, kemudahan dalam menyebarkan informasi secara massal melalui platform media sosial dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik dan mempengaruhi hasil pemilihan. Lebih lanjut, adanya filter bubble dan echo chamber di media sosial juga dapat memperkuat pemisahan dan polarisasi masyarakat, menghambat dialog yang kritis dan inklusif dalam ruang publik. Oleh karena itu, sementara era digital membawa potensi besar untuk memperkuat demokrasi melalui akses informasi yang lebih luas, juga penting untuk mengatasi tantangan ini agar demokrasi tetap berfungsi dengan baik dalam konteks digital.

Dengan berkembangnya media sosial saat ini, sangat memudahkan masyarakat dalam membaca informasi secara online. Demokrasi digital juga mulai mengambil peran strategis dengan tampil di ruang publik secara virtual. Era digital juga memberikan dampak positif dan negatif pada bidang budaya dan masyarakat, yang mempersulit perbaikan pola interaksi manusia telah berubah dengan munculnya teknologi era digital seperti komputer yang terhubung ke telepon memungkinkan untuk menghubungi dunia luar tanpa harus berkomunikasi secara langsung.

Media sosial juga memberikan masyarakat untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat secara individu, termasuk keluarga, teman dan kolega. Dengan adanya media sosial masyarakat juga dapat mengirim dengan cepat foto dan video, serta berinteraksi dengan waktu yang objektif tanpa ada batasan oleh jarak. Media sosial juga sudah memberi jalan yang mudah untuk beberapa sumber informasi, baik berita, artikel maupun informasi terupdate. Media sosial juga dapat menciptakan bisnis kecil untuk menjual atau memasarkan barang-barang atau jasa tanpa mengeluarkan biaya besar. Hal ini sangat mendorong perkembangan usaha kecil dan membantu membuka lapangan kerja baru. Teknologi media juga dapat memberikan informasi tentang berita politik dan ikut serta dalam diskusi dengan kegiatan politik. Media sosial juga dapat menjadikan masyarakat untuk membicarakan persoalan isu-isu sosial, kampanye amal dan kegiatan sosial. Hal ini dapat memberikan peningkatan kepedulian dan kerja sama masyarakat dalam hal yang penting dan mendesak.[4]

Dampak positif media sosial pada demokrasi adalah mendorong partisipasi politik yang lebih luas. Individu memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi politik, dan mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses politik. Hal ini bisa meningkatkan partisipasi dan memberikan suara kepada warga negara yang sebelumnya mungkin tidak terlibat secara langsung dalam politik. Media sosial juga dapat memberikan platform bagi penindasan, pelecehan, dan ancaman terhadap pejabat publik serta individu yang berbeda pendapat. Hal ini dapat menghambat kebebasan berekspresi dan mencegah diskusi yang produktif dan konstruktif.[5]

Media sosial telah menjadi pilar yang memegang peran kunci dalam dinamika demokrasi di era digital. Dampaknya yang signifikan terasa dalam berbagai aspek, mulai dari cara informasi disebarkan hingga bagaimana partisipasi politik berkembang. Melalui media sosial, individu memiliki akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap beragam sudut pandang dan informasi politik. Hal ini tidak hanya memperkaya pemahaman publik akan isu-isu yang relevan, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan debat politik.

Selain itu, media sosial juga menjadi sarana yang efektif dalam memobilisasi dukungan untuk berbagai gerakan sosial dan politik. Dengan mudahnya berbagi informasi dan mengorganisir aksi secara daring, aktivis dan kelompok-kelompok advokasi dapat dengan cepat menggalang massa dan menciptakan momentum untuk perubahan. Misalnya, gerakan #BlackLivesMatter dan #MeToo menunjukkan kekuatan media sosial dalam memperjuangkan hak-hak dan keadilan sosial.

Transparansi juga menjadi fitur penting yang diperoleh dari media sosial. Melalui platform-platform ini, warga dapat mengawasi dan memeriksa tindakan pemerintah dengan lebih teliti. Penyiaran langsung acara politik, pengungkapan informasi, dan diskusi publik secara terbuka

memperkuat akuntabilitas dan memaksa pemimpin untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa media sosial juga membawa tantangan baru bagi demokrasi. Penyebaran berita palsu atau hoaks dengan cepat dapat mengganggu pemahaman publik dan mempengaruhi proses politik. Filter bubble dan echo chamber juga mengancam pluralisme pendapat dan menghambat dialog yang kritis. Oleh karena itu, sementara media sosial memiliki potensi besar untuk memperluas partisipasi politik, transparansi, dan gerakan sosial, juga diperlukan upaya untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa platform-platform ini tetap menjadi alat yang memperkuat, bukan merusak, demokrasi di era digital.

Kesimpulannya, media sosial telah memiliki dampak yang signifikan pada era digital dalam demokrasi. Selain itu media sosial juga mendorong partisipasi politik yang lebih luas, transparansi dan gerakan sosial.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Literatur Review dari berbagai sumber yang relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Politik Di Teknologi Digital Dalam Konteks Demokrasi

Indonesia adalah sebuah negara yang mengutamakan prinsip demokrasi. Partisipasi politik dalam konteks Indonesia mengacu pada keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik. Ini meliputi peran serta mereka dalam menentukan pemimpin, proses pembuatan kebijakan publik, dan pengawasan pemerintahan. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek kunci dalam menjalankan sistem demokrasi yang efektif. Perkembangan partisipasi politik di Indonesia saat ini sangat dinamis, terutama di kalangan warga negara yang berpartisipasi dengan lebih kreatif daripada hanya menjadi subyek dalam proses politik. Saat ini, masyarakat lebih dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik guna mewujudkan kemajuan dalam sistem demokrasi. Konsep partisipasi dalam tata pemerintahan yang baik menjadi pilihan yang penting untuk memastikan kesuksesan pemerintahan yang berorientasi pada rakyat dan menciptakan keadilan sosial [6].

Menurut Samuel P. Huntington & Nelson (1994), partisipasi merupakan ciri khas dari modernisasi politik, dan tingkat kemajuan demokrasi dapat diukur dari sejauh mana partisipasi politik masyarakat berlangsung. Partisipasi politik adalah bentuk pemberdayaan dan sikap responsif terhadap aspirasi politik masyarakat secara kolektif. Politik dianggap sebagai fenomena komunikasi, sebuah peristiwa kolektif yang melibatkan interaksi dan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada cara masyarakat berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Akses terhadap informasi politik mengalami peningkatan yang besar, terutama dengan adanya media sosial sebagai platform baru untuk berdiskusi mengenai isu-isu politik. Media sosial menjadi wadah publik bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi berita, dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.

Peran teknologi digital juga membuka peluang partisipasi politik yang lebih inklusif. Dengan menggunakan platform online, warga dapat berpartisipasi dalam diskusi, menandatangani petisi digital, menggalang dana untuk kampanye politik, dan ikut serta dalam konsultasi publik. Ini memberikan suara kepada individu yang sebelumnya mungkin kurang terlibat aktif dalam politik, dan dengan demikian, meningkatkan representasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Teknologi digital memberikan alat yang efektif bagi masyarakat untuk berbagi pandangan, mengorganisir gerakan politik, dan menyuarakan tuntutan kepada pemimpin politik.

Salah satu segmen yang menjadi fokus kampanye dan sosialisasi di media sosial adalah komunitas. Komunitas memiliki relasi pribadi yang kuat karena berbagi kesamaan minat dan nilai. Strategi kampanye dan sosialisasi berbasis media sosial yang berhasil dapat meyakinkan sebuah komunitas, sehingga dapat mendapatkan dukungan untuk memilih seorang kandidat tertentu. Pada akhirnya, anggota komunitas akan dimobilisasi untuk mendukung kandidat dalam pemilihan tertentu.

Namun, partisipasi politik melalui media sosial memiliki perbedaan signifikan dengan partisipasi melalui media tradisional. Melalui media sosial, individu dapat membangun hubungan yang lebih aktif dan bermakna dengan lembaga-lembaga resmi, sehingga mereka merasa lebih dekat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan bebas. Era digital menimbulkan tantangan bagi kandidat, partai politik, dan para relawan dalam pemilu. Mereka harus mampu beradaptasi dengan era baru ini dan bertransformasi agar dapat menghadapi pengelolaan politik secara digital dengan baik [5].

Partisipasi politik merupakan hal penting dalam konteks Indonesia. Ada berbagai cara bagi warga negara untuk terlibat dalam bidang politik, termasuk memberikan suara dalam Pemilu atau Pilkada, mengirim pesan ke pemerintah, ikut dalam aksi protes, menjadi anggota partai politik atau organisasi kemasyarakatan, mencalonkan diri untuk jabatan publik, memberikan sumbangan kepada partai atau politisi, dan berpartisipasi dalam acara penggalangan dana.

Kemajuan teknologi digital telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks partisipasi politik. Pentingnya partisipasi politik terus diperkuat dengan adanya teknologi digital yang memudahkan akses informasi dan komunikasi antara warga negara. Internet dan media sosial menjadi platform utama dalam menyediakan akses informasi politik yang lebih cepat dan luas daripada sebelumnya. Warga negara kini dapat dengan mudah mencari berita politik terkini, pandangan ahli, dan data statistik secara real-time, tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi. Dengan demikian, teknologi digital telah memperkuat peran warga negara sebagai aktor politik yang terinformasi dan berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Dalam era digital, internet dan media sosial telah berfungsi sebagai public sphere baru bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi politik. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi, berbagi pandangan, dan menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai isu politik. Diskusi politik tidak lagi terbatas pada ruang fisik tertentu, tetapi telah meluas menjadi dunia maya yang menghubungkan berbagai individu dari berbagai latar belakang dan lokasi. Dengan begitu, partisipasi politik menjadi lebih inklusif dan lebih memungkinkan partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat.

Salah satu keuntungan utama dari partisipasi politik melalui teknologi digital adalah kemudahan dalam berbagi informasi. Warga negara dapat dengan cepat menyebarkan berita politik, data, dan pandangan melalui platform media sosial dengan mudah. Ini membuka peluang bagi warga untuk menjadi pembuat opini dan mempengaruhi persepsi publik tentang isu-isu politik. Namun, di sisi lain, tantangan muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas tersebut, karena masyarakat juga harus memilah dan memverifikasi informasi yang mereka terima agar tidak menjadi korban dari penyebaran disinformasi atau hoaks.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital telah memberikan dorongan positif bagi partisipasi politik, namun perlu diingat bahwa partisipasi yang efektif membutuhkan literasi digital yang baik. Penting bagi warga negara untuk mengembangkan pemahaman yang kritis tentang informasi yang mereka temui di dunia maya. Kemampuan untuk memilah berita yang valid dan mengidentifikasi hoaks atau informasi palsu adalah keterampilan yang sangat penting dalam menghadapi kompleksitas informasi di era digital.

Selain itu, partisipasi politik melalui teknologi digital juga berarti bahwa warga harus menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Dalam suasana yang cepat dan mudahnya penyebaran informasi, warga harus waspada terhadap konsekuensi dari menyebarkan informasi yang belum diverifikasi atau berita palsu yang dapat merugikan orang lain atau menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital di kalangan warga negara. Pemerintah dapat memfasilitasi program pelatihan dan pendidikan politik yang melibatkan pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana. Di sisi lain, masyarakat sipil dapat mengambil peran sebagai pengawas dan fasilitator dalam menyediakan sumber daya edukatif yang dapat membantu warga negara mengembangkan literasi digital dan kritis.

Dalam kesimpulannya, pentingnya partisipasi politik semakin diperkuat oleh kemajuan teknologi digital. Internet dan media sosial telah memainkan peran sentral dalam menyediakan akses informasi politik yang lebih cepat dan luas. Partisipasi politik melalui teknologi digital membuka peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi politik dan mempengaruhi kebijakan publik. Namun, tantangan juga muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas dan mengembangkan literasi digital yang baik. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam meningkatkan literasi digital di kalangan warga negara menjadi kunci untuk memastikan partisipasi politik yang sehat dan berdampak positif di era digital yang terus berkembang..

D. Kesimpulan

Kemajuan teknologi digital telah memperkuat partisipasi politik di Indonesia, memungkinkan warga negara untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik melalui internet dan media sosial. Namun, tantangan muncul dalam mengelola informasi yang tersebar luas dan memastikan literasi digital yang baik di antara masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan memastikan partisipasi politik yang sehat dan berdampak positif di era digital ini. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya memainkan peran kunci dalam memperkuat partisipasi masyarakat melalui teknologi dan media sosial dalam proses demokrasi di Indonesia. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung, mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi, serta meningkatkan literasi media dan kesadaran publik. Kolaborasi ini juga memungkinkan advokasi bersama dalam mengatasi konten negatif dan mempromosikan partisipasi yang sehat. Melalui upaya bersama ini, diharapkan manfaat teknologi dan media sosial dalam demokrasi dapat dioptimalkan sambil mengatasi dampak negatifnya.

E. Referensi

- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Elizamiharti, E., & Nelfira, N. (2024). Demokrasi di era digital: Tantangan dan peluang dalam partisipasi politik. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(1), 61–72.
- Fitriani, D., Budiyani, Y., Hardika, A. R., & Choerunissa, M. (2023). Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia: Analisis peran teknologi dan media sosial. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 362–371.
- Gunadi, A., & Amri, I. F. (2023). Komparasi sistem pemerintahan & konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (RRC) dan Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 41–49.
- Harahap, I. H. (2020). Kampanye Pilpres 2019 melalui media sosial dan pengaruhnya terhadap demokrasi Indonesia. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 17(1).
- Indrawan, J., Rosa, A. J., Ilmar, A., & Nathanael, G. K. (2021). Partisipasi politik masyarakat di era politik siber. *Journal of Political Issues*, 3(1), 1–12.
- Kurniawan, I. G. S. (2020). Peran dan fungsi pemerintahan good governance dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 62–78. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.203>
- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416–433.
- Purwaningtyas, F. (2018). Literasi informasi dan literasi media. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 12(2), 1–9.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Sahid, A. A. (2016). Demokrasi nothing: Kritik terhadap konsep dan praktek cyberdemocracy. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, 22, 1–11.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62–72.